



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu melaksanakan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Rencana Aksi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan kegiatan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tersebut bertujuan antara lain:

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- b. Semua unsur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah berkewajiban untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
- c. Mewujudkan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah yang profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik paratur negara;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 5 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Adi Umbu Lepa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	MANAJEMEN PERUBAHAN					
1	Penyusunan Tim Kerja	a. Menerbitkan Keputusan Tim Kerja/Kelompok Kerja	Menerbitkan Keputusan Tim Pembangunan Zona Integritas	Keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Zona Integritas	Jan-Des 2026	Tim Manajemen Perubahan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		b. Tim Kerja dibentuk melalui prosedur/mechanisme yang jelas	Menyusun tim pembangunan zona integritas dengan melibatkan seluruh unsur unit	Keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Zona Integritas	Jan-Des 2026	
2	Rencana Pembangunan ZI	a. Dokumen Rencana Aksi ZI telah disusun	Menerbitkan Keputusan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Keputusan Kpu Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Jan-Des 2026	
		b. Dokumen Rencana Aksi memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI	Menerbitkan Keputusan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Keputusan Kpu Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Jan-Des 2026	
		c. Terdapat media dan laman resmi untuk mensosialisasikan pembangunan ZI	Melakukan sosialisasi melalui media sosial dan banner Zona Integritas di Kantor KPU Kabupaten Sumba Tengah serta mengunggah SK Rencana Aksi dan Tim Pembangunan Zona Integritas di lama website JDIH KPU Kabupaten Sumba Tengah	Bannder ZI; poster Zona Integritas; Sosialisasi ZI melalui web; dan banner budaya kerja ASN	Jan-Des 2026	
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	a. Timeline Pembangunan ZI telah disusun	Melaksanakan pembangunan ZI sesuai dengan rencana aksi	E-monev; Dokumen Sakip; Rencana Aksi Pembangunan Zona	Jan-Des 2026	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	WBK dan WBBM	sesuai dengan rencana		Integritas; Rencana Aksi Reformasi Birokrasi		
		b. Pemantauan dan evaluasi Pembangunan ZI (per semester/per triwulan)	Melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin	E-monev; Dokumen Sakip; Rencana Aksi Pembangunan Zona	Jan-Des 2026	
		c. Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti monitoring dan evaluasi tim internal	Rapat pleno rutin	Jan-Des 2026	
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	a. Para pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan ZI	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Absensi Pimpinan; Dokumentasi Apel; Pengarahan Pimpinan; Pakta Integritas	Jan-Des 2026	
		b. Telah menetapkan agen perubahan	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan	SK Tim Agen Perubahan/ Reformasi Birokrasi	Jan-Des 2026	
		c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	Membuat SK Pelayanan Publik, membuat Tim Reformasi Birokrasi, dan menerapkan Budaya Malu ASN	Menerbitkan SK Pelayanan Publik, SK tim Reformasi Birokrasi, dan membuat banner Budaya Malu ASN	Jan-Des 2026	
		d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan ZI	Melibatkan seluruh pegawai KPU Kabupaten Sumba Tengah ke dalam Tim Reformasi Birokrasi	SK KPU Kabupaten Sumba Tengah tentang Tim Reformasi Birokrasi	Jan-Des 2026	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	6	7	
2	PENATAAN TATA LAKSANA						
1	Prosedur Oprasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	a. SOP telah ditetapkan dan mengacu proses instansi	telah dan pada bisnis	Menyusun SOP KPU Kabupaten Sumba Tengah yang sesuai dengan Peta Proses Bisnis KPU	Peta Proses Bisnis KPU; Kumpulan SOP KPU Kabupaten Sumba Tengah	Jan-Des 2026	Tim Penata Tata Laksana
		b. SOP telah diterapkan dan dipahami oleh seluruh pegawai	telah dan oleh	Menyusun SOP yang memiliki unsur invonasi untuk meningkatkan kualitas layanan.	Menyusun beberapa SOP yang memiliki unsur invonasi untuk meningkatkan kualitas layanan.	Jan-Des 2026	
		c. SOP telah dilakukan evaluasi		Melakukan evaluasi tahunan terhadap SOP yang telah dibuat	Daftar Inventaris SOP; Monitoring SOP; Evaluasi Penerapan SOP	Jan-Des 2026	
2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	a. Sistem pengukuran kinerja sudah menggunakan teknologi informasi		Membuat laporan kinerja yang diisi secara digital dan melakukan inventarisasi aplikasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sumba Tengah untuk mendukung kegiatan operasional, administrasi, dan pelayanan.	Link pengisian laporan kinerja; Daftar inventaris aplikasi KPU Kabupaten Sumba Tengahs	Jan-Des 2026	
		b. Operasionalisasi manajemen SDM telah menggunakan teknologi informasi		Membuat laporan kinerja yang diisi secara digital dan melakukan inventarisasi aplikasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sumba Tengah	Link pengisian laporan kinerja; Daftar inventaris aplikasi KPU Kabupaten Sumba Tengah	Jan-Des 2026	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			untuk mendukung kegiatan operasional, administrasi, dan pelayanan.			
		c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan penyampaian informasi publik	Aplikasi JDIH, E PPID; website KPU Kabupaten Sumba Tengah; media sosial KPU Kabupaten Sumba Tengah	Jan-Des 2026	
		d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT dalam pemberian pelayanan publik telah dilakukan evaluasi secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Pemantauan berkala aplikasi pelayanan online	Jan-Des 2026	
3	Keterbukaan Informasi Publik	a. Kebijakan informasi publik telah diterapkan	Membuat ruang PPID, Menunjuk petugas PPID, melakukan monitoring E PPID, dan membuat daftar informasi publik KPU Kabupaten Sumba Tengah	Dokumentasi ruang PPID; petugas pelayanan informasi; maklumat informasi pelayanan publik; E PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah, Daftar Informasi Publik	Jan-Des 2026	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Sumba Tengah	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi publik	Jan-Des 2026	
3	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA					
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan Organisasi	a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja	Menempatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan lembaga	SK Pengangkatan CPNS; SK Pengangkatan PPPK; Surat Panggilan Melaksanakan Tugas CPNS; Surat Panggilan Melaksanakan Tugas PPPK Periode 1 dan Periode 2	Jan-Des 2026	Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
		b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan Formasi CPNS, PPPK, Pegawai Mutasi maupun rotasi pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Tengah	SK Pengangkatan CPNS; SK PPPK; SK Mutasi Pegawai pada Tahun 2026	Jan-Des 2026	
		c. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Evaluasi kinerja CPNS dan Pegawai	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2026	Jan-Des 2026	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja				
2	Pola Mutasi Internal	a. Menetapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanaan rotasi internal	SK Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum di KPU Kabupaten Sumba Tengah	Jan-Des 2026	
		b. Menerapkan kebijakan pola rotasi internal berdasarkan perubahan Nomenklatur SOTK	Melaksanakan pola rotasi	SK Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum di KPU Kabupaten Sumba Tengah	Jan-Des 2026	
		c. Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	Melakukan monitoring dan evaluasi oleh tim penilai kinerja	SK Sekjen KPU RI tentang pemberhentian dan pengangkatan Kasubag di lingkungan Sekretariat Provinsi dan sekretariat Kab/Kota Nusa Tenggara Timur; Sasaran Kinerja Pegawai 2026	Jan-Des 2026	
3	Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi	a. Unit kerja melakukan <i>training need analysis</i> untuk pengembangan Kompetensi	Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Usulan diklat/ bimtek melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Bagian Diklat	Jan-Des 2026	
		b. Penyusunan rencana pengembangan pegawai	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah	Pelatihan kompetensi PBJ; Daftar Sertifikat/ Pelatihan Pegawai	Jan-Des 2026	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai			
		c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing dapat diatasi	Mengarahkan pegawai yang belum memiliki sertifikat keahlian untuk mengikuti diklat keahlian dan Menyusun daftar pegawai yang sudah memiliki pelatihan keahlian	Diklat PBJ dan Daftar Sertifikat/Pelatihan Pegawai	Jan-Des 2026	
		d. Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat	Daftar Sertifikat/ Pelatihan Pegawai	Jan-Des 2026	
		e. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui coaching atau mentoring.	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, mengikut sertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, mengikut sertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek	Jan-Des 2026	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		f. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Data pegawai yang mengikuti diklat	Jan-Des 2026	
4	Penetapan Kinerja Individu	a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	Melakukan penilaian PK Eselon III tahun 2026 dan Sasaran Kinerja Pegawai Eselon III dan IV tahun 2026	PK Eselon III tahun 2026 dan Sasaran Kinerja Pegawai Eselon III dan IV tahun 2026; Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2026; renstra 2023 - 2027	Jan-Des 2026	
		b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penilaian PK Eselon III tahun 2026 dan Sasaran Kinerja Pegawai Eselon III dan IV tahun 2026	PK Eselon III tahun 2026 dan Sasaran Kinerja Pegawai Eselon III dan IV tahun 2026; Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2026; renstra 2020- 2024	Jan-Des 2026	
		c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	Sasaran Kinerja Pegawai 2026	Jan-Des 2026	
		d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Menyusun data pegawai penerima Satya Lancana	Data pegawai penerima Satya lancana	Jan-Des 2026	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai	Jan-Des 2026	
6	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	Jan-Des 2026	
4	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA					
1	Keterlibatan Pimpinan	a. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Tengah memberikan pengarahan dan menandatangani RKKL 2026	RKKL 2026	Jan-Des 2026	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
		b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Tengah terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LAKIP KPU Kabupaten Sumba Tengah	Jan-Des 2026	
		c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LAKIP KPU Kabupaten Sumba Tengah	Jan-Des 2026	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada	Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Sumba Tengah	Jan-Des 2026	
		b. Dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	Menyusun Indikator Kinerja Utama di RENSTRA	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	Jan-Des 2026	
		c. Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA	Jan-Des 2026	
		d. Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART	Menyusun Indikator Kinerja Utama 2026	Indikator Kinerja Utama	Jan-Des 2026	
		e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP 2026	LAKIP KPU Kabupaten Sumba Tengah tahun 2026 tepat waktu	Jan-Des 2026	
		f. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP 2026	LAKIP KPU Kabupaten Sumba Tengah tahun 2026 tepat waktu	Jan-Des 2026	
		g. Terdapat sistem informasi/mechanisme informasi kinerja	Menyusun rekapitulasi laporan kinerja harian	Laporan Kinerja Harian	Jan-Des 2026	
		h. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun LAKIP 2026	PK dan dokumentasi rapat penyusunan LAKIP 2026	Jan-Des 2026	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
5	PENGUATAN PENGAWASAN					
1	Pengendalian Gratifikasi	a. <i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Tengah	Poster antigratifikasi dan poster Zona Integritas	Jan-Des 2026	Tim Penguatan Pengawasan
		b. Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Tengah	SK Tim Reformasi Birokrasi; SK Pembentukan Satgas SPIP; SK Rencana Aksi Birokrasi; SK Tim Asesor Maturitas SPIP; Laporan Reformasi Birokrasi, Poster Antigratifikasi dan ZI; dan Pakta Integritas	Jan-Des 2026	
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	a. Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan organisasi	Melaksanakan Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kabupaten Sumba Tengah	Keputusan Tim Reformasi Birokrasi; SK Zona Integritas; SK Satgas SPIP; Laporan SPIP KPU Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026; Kendali SPIP Kabupaten Sumba Tengah 2026; Dokumentasi Rapat Pleno Kartu Kendali; Mitigasi Resiko	Jan-Des 2026	
		b. Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Keputusan Tim Reformasi Birokrasi; SK Zona Integritas; SK Satgas SPIP; Laporan SPIP KPU	Jan-Des 2026	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026; Kendali SPIP Kabupaten Sumba Tengah 2026; Dokumentasi Rapat Pleno Kartu Kendali; Mitigasi Resiko		
		c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Menyusun mitigasi resiko	Keputusan Tim Reformasi Birokrasi; SK Zona Integritas; SK Satgas SPIP; Laporan SPIP KPU Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026; Kendali SPIP Kabupaten Sumba Tengah 2026; Dokumentasi Rapat Pleno Kartu Kendali; Mitigasi Resiko	Jan-Des 2026	
		d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumentasi Rapat	Jan-Des 2026	
3	Pengaduan Masyarakat	a. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Kabupaten Sumba Tengah	Pengaduan masyarakat melalui KPU Kabupaten Sumba Tengah	Jan-Des 2026	
		b. Hasil penanganan Pengaduan	Menyusun Laporan dan merekap setiap bulan Pengaduan Masyarakat	Laporan Dumas; rekap berkala Dumas	Jan-Des 2026	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		masyarakat telah ditindaklanjuti				
		c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi	Jan-Des 2026	
		d. Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel Monev pengaduan Masyarakat	Jan-Des 2026	
4	Whistle Blowing System	a. Whistle Blowing System sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan saluran komunikasi untuk Pengaduan Masyarakat	Nomor Dumas; Petugas Dumas; postingan sosmed terkait Dumas	Jan-Des 2026	
		b. Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System sudah dilakukan	KPU Kabupaten Sumba Tengah Melakukan monev terhadap Dumas	Laporan Dumas dan rekap Dumas setiap bulan	Jan-Des 2026	
		c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Melakukan monev Dumas	Laporan Dumas 2026	Jan-Des 2026	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
5	Penanganan Benturan Kepentingan	a. Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Tim ZI KPU Kabupaten Sumba Tengah melakukan Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan pada KPU Kabupaten Sumba Tengah	Jan-Des 2026	
		b. Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Tengah	Daftar Mitigasi Resiko KPU Kabupaten Sumba Tengah	Jan-Des 2026	
		c. Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Menyusun Pencegahan Benturan Kepentingan	Daftar Mitigasi Risiko KPU Kabupaten Sumba Tengah	Jan-Des 2026	
		d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kabupaten Sumba Tengah	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan; Laporan SPIP; Daftar Mitigasi Resiko KPU Kabupaten Sumba Tengah	Jan-Des 2026	
		e. Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan dan Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Jan-Des 2026	
6	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Standar Pelayanan	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	SK dan SOP Pelayanan Publik	Jan-Des 2026	Tim Penguatan Pelayanan Publik
		b. Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik	Jan-Des 2026	
		c. Dilakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Revidi SOP	Jan-Des 2026	
		d. Telah dilakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Mengunggah alur pelayanan publik dan maklumat pelayanan	Jan-Des 2026	
2	Budaya pelayanan prima	a. Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam Upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	Dokumentasi kegiatan	Jan-Des 2026	
		b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman Website KPU dan Media Sosial	Jan-Des 2026	
		c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan	Memberikan penghargaan dan sanksi bagi pegawai	Pemberian penghargaan dan sanksi pegawai	Jan-Des 2026	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		sanksi bagi petugas pemberi layanan				
		d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar	Menyusun sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar pada SOP Pelayanan	SOP Pelayanan memuat pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar pada SOP Pelayanan	Jan-Des 2026	
		e. Telah terdapat sarana Layanan terpadu/ terintegrasi	Pelayanan PPID, Pelayanan Dumas, dan helpdesk	PPID; Dumas; dan helpdesk	Jan-Des 2026	
		f. Terdapat Inovasi pelayanan	Menetapkan bentuk inovasi pelayanan yang sederhana, berdampak, dan berkelanjutan.	Layanan Informasi Kepemiluan Digital KPU Kabupaten Sumba Tengah	Jan-Des 2026	
3	Pengelolaan Pengaduan	a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!	Membuat tim Dumas dan sarana untuk pelaporan Dumas	SK Tim Dumas; Nomor Whatsapp Dumas; Barcode Dumas	Jan-Des 2026	
		b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	Menyusun tim Dumas	SK Tim Dumas	Jan-Des 2026	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Menyusun laporan Dumas	Laporan Dumas; Rekap Bulanan Dumas	Jan-Des 2026	
4	Penilaian Kepuasan Pelayanan	a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survei kepuasan masyarakat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2026	Jan-Des 2026	
		b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survei kepuasan masyarakat melalui website dan sosial media KPU Kabupaten Sumba Tengah	Hasil survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2026	Jan-Des 2026	
		c. Dilakukan tindaklanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Menyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Jan-Des 2026	
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	a. Teknologi Informasi telah diterapkan dalam pemberian pelayanan	Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan serta telah melakukan monitoring evaluasi atas seluruh sistem informasi	JDIH KPU Kabupaten Sumba Tengah; E=PPID KPU Kabupaten Sumba Tengah; Laman Website KPU Kabupaten Sumba Tengah	Jan-Des 2026	
		b. Database pelayanan telah dibangun dan terintegrasi	Membangun layanan informasi yang terpadu, serta terdapat berbagai aplikasi Pemilu dan Pemilihan yang terintegrasi	Cek DPT online; Silon; SIKADEKA, JDIH; Website KPU Kabupaten Sumba Tengah	Jan-Des 2026	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			dengan portal info Pemilu dan Pemilihan			
		c. Telah dilakukan perbaikan terhadap pemanfaatan Teknologi Informas	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan IT secara terus menerus dan berkelanjutan serta pemantauan terhadap operator pengguna aplikasi	Cek DPT online; Silon; SIKADEKA, JDIH; Website KPU Kabupaten Sumba Tengah	Jan-Des 2026	

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 5 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,
ttd.
FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Adi Umbu Lepa